

PERBANDINGAN SISTEM PERENCANAAN, KEWENANGAN, DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH: STUDI ANALISIS RKPD, APBD, PAD, MONITORING-EVALUASI, DAN PARTISIPASI PUBLIK DI PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

Rania Talitha Yumna¹, Kanaya Aulia Gunadi², Cinta Khoir³

raniatalitha0@gmail.com¹, kanayagunadi@gmail.com², khoircinta1@gmail.com³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta dengan menelaah dokumen RKPD, struktur APBD, kapasitas PAD, mekanisme monitoring-evaluasi, serta pola partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah. Perbedaan status kelembagaan DKI Jakarta sebagai daerah khusus tanpa kabupaten/kota otonom, dan Banten sebagai provinsi dengan delapan daerah otonom menjadi faktor utama yang membentuk variasi dalam proses perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki proses perencanaan yang lebih terpusat dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem digital seperti e-planning dan e-budgeting, sehingga menghasilkan sinkronisasi program yang lebih kuat serta serapan anggaran yang relatif tinggi. Sumber pendapatan yang besar dari pajak daerah juga membuat Jakarta lebih mandiri secara fiskal dan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Sebaliknya, Provinsi Banten menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti keterbatasan PAD, ketergantungan pada dana transfer, kesenjangan kapasitas teknis antardaerah, serta proses koordinasi yang panjang karena perbedaan prioritas antara provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme partisipasi publik di Banten juga cenderung bersifat seremonial melalui Musrenbang, meskipun inovasi seperti Rakortek dan pemanfaatan media sosial mulai digunakan untuk memperluas ruang aspirasi warga. Secara keseluruhan, perbandingan kedua daerah menunjukkan bahwa kapasitas fiskal, struktur pemerintahan, dan kualitas tata kelola menjadi penentu utama keberhasilan sistem perencanaan dan penganggaran. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi perencanaan, peningkatan kapasitas birokrasi, serta pemanfaatan teknologi dalam memperkuat efektivitas pembangunan daerah.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan Daerah, APBD, PAD, Monitoring Evaluasi, Partisipasi Publik.

ABSTRACT

This study examines the differences in regional planning and budget management systems between Banten Province and DKI Jakarta by analyzing their RKPD documents, APBD structure, local revenue capacity (PAD), monitoring–evaluation mechanisms, and public participation practices. The institutional distinction DKI Jakarta as a special region without autonomous municipalities and Banten as a province overseeing eight autonomous districts and cities creates significant variations in planning processes, intergovernmental coordination, and fiscal management effectiveness. The findings reveal that DKI Jakarta applies a more centralized and integrated planning system supported by digital platforms such as e-planning and e-budgeting, enabling stronger program alignment and higher budget absorption rates. Its substantial local revenue base allows the region to operate with minimal reliance on central government transfers. Conversely, Banten continues to face structural challenges, including limited fiscal capacity, high dependence on central transfers, unequal bureaucratic capabilities across its regions, and lengthy coordination processes due to the diversity of local priorities. Although public participation is formally accommodated through Musrenbang, it tends to be ceremonial, and broader engagement is increasingly facilitated through Rakortek forums and social media-based feedback channels. Overall, the comparison demonstrates that fiscal capacity, institutional structure, and governance quality are critical determinants of planning and budgeting effectiveness. The study highlights the need for stronger integration,

improved bureaucratic capacity, and enhanced use of digital tools to support more responsive and accountable regional development.

Keywords: *Regional Development Planning, Regional Budget (APBD), Local Revenue (PAD), Monitoring And Evaluation, Public Participation.*

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menggunakan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen penganggaran seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman penting untuk menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi bagaimana program dilaksanakan (Duha & Waruru, 2024). Namun, dalam praktik, setiap daerah memiliki kapasitas, otoritas, dan atribut fiskal yang berbeda, yang berdampak pada cara perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan.

Dengan keduanya berada di kawasan metropolitan Jabodetabek, Provinsi Banten dan DKI Jakarta menarik untuk dibandingkan. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal status kewenangan, struktur fiskal, kapasitas birokrasi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Sebagai daerah khusus, DKI Jakarta memiliki kewenangan yang lebih luas, kapasitas fiskal yang besar, dan birokrasi yang cukup mapan dalam perencanaan dan evaluasi Pembangunan (Maulana, 2018). Sebaliknya, Provinsi Banten, sebagai daerah otonom reguler, masih menghadapi masalah koordinasi lintas kabupaten/kota, bergantung pada transfer pusat, dan kurangnya integrasi perencanaan. Hal ini berdampak pada kualitas dokumen RKPD dan efektivitas APBD.

Kewenangan dan kekuatan fiskal yang berbeda tidak hanya memengaruhi bagaimana RKPD dan APBD disusun, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan (Musrenbang), dan melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk memastikan akuntabilitas pembangunan. Sebaliknya, analisis pengalaman kedua daerah ini semakin relevan karena dinamika politik lokal, kualitas birokrasi, dan tingkat partisipasi publik (khusaini, 2014).

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan sistem perencanaan, implementasi kewenangan, dan pengelolaan anggaran di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Penelitian ini berkonsentrasi pada RKPD, APBD, PAD, mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta partisipasi publik. Dengan melakukan analisis komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang elemen-elemen yang memengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi rujukan untuk upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih jelas, responsif, dan berfokus pada kebutuhan warga.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah meletakkan dasar untuk desentralisasi di bidang fiskal, politik, dan administrasi, yang memungkinkan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengatur wewenang dan fungsi antara pemerintah daerah dan pusat, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 membagi wewenang dan fungsi antara pemerintah. Kedua undang-undang tersebut mempertimbangkan kekayaan dan potensi sumber daya masing-masing daerah saat membangun otonomi daerah.

Dalam hal keuangan daerah, adalah tugas publik pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran yang tepat akan memaksimalkan output dan mencapai tujuan untuk

kebaikan masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah secara konsisten merupakan salah satu elemen perencanaan anggaran yang sangat penting. Namun, perlu diingat bahwa pengeluaran daerah yang terus meningkat dapat menyebabkan gap fiskal yang lebih besar. Kondisi seperti ini berdampak pada kinerja dan tingkat ekonomi pemerintah daerah. Akibatnya, over- atau underfunding dapat terjadi (Meiriki et al., 2020).

Anggaran Pendapatan Daerah (APD) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kemampuan fiskal suatu daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi anggaran juga menunjukkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskalnya. DKI Jakarta dan Banten memiliki struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan kemampuan fiskal yang berbeda. DKI Jakarta memiliki sumber pendapatan yang lebih besar dan basis ekonomi yang luas dan beragam sebagai ibu kota negara. Selain itu, Provinsi Banten menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan PAD dan memaksimalkan potensi pendapatan lainnya karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan DKI Jakarta.

METODE

Tanpa bergantung pada hasil kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara menyeluruh dan sistematis. Metode ini dipilih karena penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis implementasi kewenangan dan pengelolaan anggaran di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, yang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang proses, dinamika birokrasi, dan perspektif pemangku kepentingan. Peneliti dapat menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana struktur kewenangan dijalankan, bagaimana kapasitas fiskal mempengaruhi keputusan anggaran, dan bagaimana aktor-aktor daerah menanggapi perbedaan kapasitas dalam praktik pemerintahan.

Penelitian jenis ini termasuk dalam kategori penelitian dasar karena tujuan utamanya adalah memperluas pemahaman teoritis tentang implementasi kebijakan dan desentralisasi fiskal daripada menemukan solusi praktis. Penelitian dasar memungkinkan peneliti menghubungkan temuan empiris dengan teori-teori utama seperti desentralisasi, kapasitas fiskal, pemerintahan, dan implementasi kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan dengan metode ini dapat memberikan gambaran mendalam yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang tata kelola pemerintahan daerah.

Data dikumpulkan dengan melihat literatur dan menganalisis dokumen. Peneliti menemukan berbagai sumber akademik, termasuk laporan lembaga resmi RKPD, APBD, dan peraturan 5 perundang-undangan yang relevan. Untuk mendapatkan pemahaman tentang kerangka hukum, struktur fiskal, dan tujuan kebijakan pembangunan di kedua provinsi, dokumen-dokumen tersebut diperiksa. Setiap literatur dan dokumen diperiksa secara menyeluruh untuk menilai relevansinya, kualitasnya, dan kontribusinya untuk analisis penelitian.

Peneliti juga mengumpulkan data tematik. Metode ini digunakan untuk menemukan pola, kategori, dan hubungan antarvariabel yang dihasilkan dari dokumen kebijakan dan hasil kajian teoritis. Analisis tematik membantu peneliti mengorganisasi data secara sistematis. Ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan antara pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kewenangan dengan cara yang lebih terstruktur.

Nazir (2013) dalam Kusnurani & Roesminingsih (2020) menyatakan bahwa studi literatur sangat penting untuk penelitian karena memberikan pijakan konseptual yang kuat sebelum peneliti melakukan analisis lebih lanjut. Akibatnya, penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan sumber utama untuk pemahaman lebih lanjut tentang tren, masalah, dan praktik pengelolaan anggaran di daerah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

baik tentang seberapa efektif otoritas dan kemampuan fiskal Provinsi Banten dan DKI Jakarta, semua data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh.

KAJIAN LITERATUR

Dua kerangka teori utama biasanya berdiri dibalik penelitian tentang perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah teori desentralisasi dan otonomi daerah dan prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah telah berwenang untuk menetapkan prioritas lokal melalui desentralisasi, pemerintahan sementara yang baik tekanan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Menurut penelitian umum empiris, kombinasi kemampuan birokrasi, struktur fiskal , dan tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan perencanaan dan penganggaran daerah (literatur desentralisasi & tata pemerintahan yang baik ringkasan teori; lihat studi perencanaan daerah di buku dan jurnal administrasi publik).

Dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) adalah penjabaran tahunan dari RPJMD dan kerangka pelaksanaan program-program prioritas daerah. RKPD berfungsi sebagai landasan untuk menyusun kebijakan anggaran tahunan dan membantu mengkoordinasikan antara perangkat daerah dan pemerintahan tingkat atas-bawah. Regulasi teknis terbaru yang menetapkan status RKPD sebagai dokumen operasional perencanaan daerah dan menetapkan prosedur penyusunannya . Implikasi bagi penelitian: Apakah proses perencanaan daerah bersifat strategis atau sekadar formalitas administratif, kualitas RKPD (keterpaduan tujuan, indikator, dan pembiayaan) sering menjadi ukuran awal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen keuangan tahunan yang berisi perkiraan pendapatan, alokasi, dan pembiayaan untuk daerah. Hal ini disusun melalui Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pembahasan eksekutif-legislatif (DPRD), dan penetapan melalui Perda. Peraturan pelaksana terbaru, mengatur proses penyusunan dan perubahan APBD. Dalam praktiknya, struktur APBD dipengaruhi oleh jenis sumber pendapatan (PAD, transfer pusat, dan pembiayaan), serta prioritas program yang ditunjukkan dalam RKPD. Oleh karena itu, ada korelasi erat antara alokasi APBD dan kualitas RKPD.

Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah (BUMD), dan lainnya termasuk dalam PAD, yang merupakan bagian penting dari postur fiskal daerah. Banyak penelitian empiris yang mencoba menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Faktor-faktor ini termasuk basis ekonomi daerah (PDRB, UMK), struktur sektor (seperti perdagangan dan transportasi), jumlah kendaraan (untuk pajak kendaraan), dan kebijakan fiskal lokal. Penelitian lokal di Provinsi Banten menunjukkan bahwa struktur PAD dipengaruhi oleh mekanisme pemungutan pajak dan pengelolaan potensi sumber daya daerah, dan kontribusi antar komponen PAD berubah dari tahun ke tahun.

Implikasi penelitian: perbedaan struktur ekonomi dan kebijakan fiskal di Banten dan DKI Jakarta, seperti konsentrasi ekonomi, basis pajak, dan kapasitas BUMD, akan berdampak pada kemampuan daerah untuk menggunakan PAD untuk membiayai program dan menentukan kemandirian fiskal.

Pemantauan dan evaluasi adalah alat untuk mengontrol efektivitas pelaksanaan RKPD dan realisasi APBD. Penggunaan e-Monev/Simonev, juga dikenal sebagai sistem informasi Monev, dianggap dapat meningkatkan transparansi realisasi program dan memudahkan pelaporan capaian. Namun, studi kasus menunjukkan bahwa e-Monev dapat berhasil jika dilakukan dengan perbaikan indikator, integrasi data, dan kemampuan SDM. Mereka juga menekankan masalah implementasi seperti indikator yang masih berorientasi pada input, masalah teknis aplikasi, dan kurangnya orientasi pada hasil.

Implikasi penelitian: Perbandingan praktik Monev antara provinsi menunjukkan seberapa jauh pemerintah daerah dapat melakukan pembelajaran kebijakan dan penyesuaian anggaran berdasarkan hasil.

Musrenbang, atau musyawarah perencanaan pembangunan, adalah mekanisme formal untuk partisipasi publik dalam penyusunan RKPD/APBD. Banyak penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat relatif tinggi di beberapa daerah tetapi kurang akuntabilitas atas hasil Musrenbang (misalnya, intervensi politik dan janji tindak lanjut usulan), sementara di tempat lain forum hanya formalitas. Akses ke informasi, kemampuan untuk advokasi masyarakat, komitmen aparatur, dan mekanisme tindak lanjut usulan adalah beberapa komponen yang menentukan partisipasi. Studi regional, termasuk wilayah Banten, menunjukkan bahwa ada kendala dalam koordinasi antar tingkat pemerintahan dan masalah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercakup dalam APBD.

Penemuan penelitian menunjukkan bahwa demokratisasi perencanaan dan legitimasi kebijakan anggaran diukur berdasarkan kualitas partisipasi, yang merupakan kombinasi dari kuantitas dan efektivitas tindak lanjut.

Salah satu kelangkaan penelitian (gap penelitian) yang masih perlu dipenuhi oleh penelitian ini adalah sebagai berikut: analisis komparatif yang menghubungkan kualitas RKPD (isi, indikator, dan pembiayaan) langsung dengan pencapaian realisasi APBD di kedua provinsi; evaluasi fungsi e-Monev/Simonev dalam mengurangi asimetri informasi antar OPD dan meningkatkan hasil; dan analisis empiris tentang bagaimana mekanisme Musrenbang di tingkat kelurahan/kecamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Anggaran dan Kinerja Perencanaan (DKJ vs Banten)

Penelitian terkini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai transparansi anggaran sangat bergantung pada kualitas sistem informasi yang dimiliki serta komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Hal ini mencakup aspek seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang efektif. Dalam praktiknya, transparansi ini tidak hanya tentang mempublikasikan dokumen anggaran, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut disusun agar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh publik.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal ini. Melalui portal Open Data Jakarta, mereka tidak sekadar membagikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga menyediakan data yang terstruktur dan interaktif. Ini memungkinkan masyarakat untuk menganalisis informasi anggaran secara mendalam, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memberdayakan warga untuk terlibat aktif dalam pengawasan setiap tahapan siklus APBD, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Faedlulloh & Wiyani (2020).

Di sisi lain, Provinsi Banten masih tertinggal dalam hal keterbukaan data. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi publik, keterbatasan dalam sistem informasi membuat pengawasan masyarakat menjadi lebih sulit. Hal ini berarti peluang bagi warga untuk berkontribusi dalam proses anggaran masih terbatas, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas tata kelola keuangan daerah.

Penelitian Yuniar & Firmansyah (2023) menegaskan hubungan erat antara tingkat transparansi keuangan daerah dengan kondisi kesehatan fiskal dan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan posisi fiskal yang solid cenderung lebih mampu berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur data terbuka. DKI Jakarta, dengan kekuatan fiskalnya yang lebih stabil, dapat mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan

sistem seperti portal data terbuka, yang mendukung transparansi dan inovasi. Sebaliknya, Banten menghadapi tantangan kelembagaan dan fiskal yang menghambat kemajuan serupa, sehingga transparansi anggaran menjadi kurang optimal.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perbedaan ini tercermin jelas. RKPD Banten 2026 (sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025) menekankan pentingnya peningkatan tata kelola digital dan integrasi antara sistem perencanaan dengan penganggaran. Namun, dokumen ini belum secara spesifik menargetkan transformasi menuju data terbuka yang komprehensif, seperti yang telah diterapkan di DKI Jakarta. Sementara itu, RKPD DKI Jakarta 2026 (Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025) secara eksplisit mengintegrasikan agenda penguatan data terbuka, pengembangan dashboard anggaran interaktif, dan peningkatan layanan publik yang didukung teknologi. Ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk memanfaatkan inovasi digital guna memperbaiki transparansi dan partisipasi masyarakat.

Untuk memperbaiki situasi di Banten, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, seperti pengembangan portal data terbuka yang mirip dengan Jakarta. Kedua, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti akademisi atau organisasi masyarakat sipil, dapat membantu membangun kapasitas kelembagaan. Ketiga, fokus pada peningkatan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan dapat memperkuat posisi fiskal, yang pada gilirannya mendukung inisiatif transparansi. Dengan demikian, Banten dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai standar transparansi yang lebih tinggi, yang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

2. Partisipasi publik dan penganggaran partisipasi

Menurut penelitian Pranesti (2022), teknologi e-government memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi dalam penganggaran, terutama melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital dapat secara signifikan meningkatkan kualitas kontribusi masyarakat, mempercepat proses verifikasi masukan, dan mengurangi bias politik dalam menentukan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, e-government tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan bahwa suara warga lebih terwakili secara adil dan efektif dalam siklus perencanaan anggaran daerah.

E-government telah berkembang di Provinsi DKI Jakarta. Mereka telah membuat sistem e-Musrenbang yang terintegrasi dengan platform pengaduan masyarakat untuk melacak proses perencanaan. Ini menghasilkan dokumentasi yang lengkap dan indikator kinerja yang dapat diukur, yang memungkinkan evaluasi partisipasi publik yang lebih objektif. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pendekatan ini mendukung prinsip pemerintahan yang baik. Ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara real-time dan melihat bagaimana usulan mereka berkembang.

Di sisi lain, Provinsi Banten masih dalam proses transisi ke digitalisasi. Sebagian besar Musrenbang di daerah ini masih dilakukan secara manual, yang sering mengakibatkan partisipasi yang terbatas dan tingkat pengawasan yang buruk. Metode konvensional seringkali mengalami masalah, seperti verifikasi yang tertunda atau dominasi oleh kelompok tertentu. Akibatnya, penganggaran partisipatif mungkin belum sepenuhnya terealisasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten 2026 mengakui masalah ini dan menekankan bahwa mekanisme perencanaan yang melibatkan masyarakat harus ditingkatkan. Dokumen tersebut mencakup strategi untuk meningkatkan kualitas Musrenbang dengan menggunakan metode yang lebih inklusif untuk partisipasi. Namun,

RKPD ini belum mencakup peta jalan digital yang rinci dan terintegrasi seperti yang ada di DKI Jakarta. Misalnya, tidak ada pendekatan khusus untuk membuat aplikasi e-Musrenbang atau mengintegrasikan sistem pengaduan online yang dapat mempercepat pergeseran menuju penganggaran yang lebih jelas dan responsif.

Untuk memperbaiki perbedaan ini, Banten dapat mempertimbangkan tindakan strategis seperti mengambil contoh dari kebiasaan DKI Jakarta. Ini mencakup investasi dalam pembuatan platform digital yang mudah digunakan, memberikan pelatihan kepada aparatur lokal dan masyarakat tentang cara menggunakan teknologi, dan bekerja sama dengan pakar IT untuk menjaga keamanan data. Dengan demikian, penganggaran partisipatif di Banten akan meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi alokasi anggaran. Pada akhirnya, penerapan e-government secara menyeluruh dapat mendorong kedua provinsi menuju tata kelola yang lebih baik, dengan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama pembangunan daerah.

3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Studi Azarin & Supratiwi (2024) menunjukkan keuntungan besar dari menggunakan visual analytics saat menilai anggaran pemerintah daerah. Teknik ini memungkinkan analisis data yang lebih akurat, mengurangi risiko pelaporan kesalahan, dan menghasilkan proses monitoring dan evaluasi (monev) yang lebih terstruktur, netral, dan efisien. Dengan menggunakan visualisasi data seperti grafik interaktif dan dashboard, pemerintah dapat dengan lebih cepat menemukan tren, anomali, dan efektivitas inisiatif. Ini membantu pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Provinsi DKI Jakarta telah mencapai tingkat kemajuan dalam adopsi sistem ini. Mereka telah membuat platform dashboard kinerja yang dapat diakses secara online yang menampilkan laporan publik dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Ini memantau realisasi anggaran secara real-time, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan pengawasan yang lebih aktif. Metode ini tidak hanya meningkatkan akurasi monev tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik melalui aksesibilitas data yang luas.

Sebaliknya, Provinsi Banten masih bergantung pada metode pelaporan tradisional yang kurang terintegrasi dengan teknologi digital. Laporan konvensional ini sering kali tidak sepenuhnya tersedia untuk publik, sehingga menghambat pengawasan eksternal dan mengurangi efektivitas proses monev. Akibatnya, evaluasi anggaran di daerah ini cenderung kurang objektif dan lebih lambat dalam mendeteksi masalah, yang dapat berdampak pada efisiensi penggunaan dana publik.

Menurut penelitian Badewin et al. (2025), kualitas pelaporan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan infrastruktur digital. Daerah yang belum memiliki alat monev berbasis digital sering mengalami masalah dalam hal ketepatan data dan waktu penyampaian laporan. Ini menekankan bahwa pelatihan karyawan dan pengembangan sistem teknologi untuk mengatasi ketimpangan tersebut harus diinvestasikan.

Untuk memperbaiki situasi di Banten, beberapa langkah praktis dapat diterapkan. Pertama, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk membangun dashboard visual yang mirip dengan DKI Jakarta, dengan fokus pada kemudahan akses dan interaktivitas. Kedua, program peningkatan kapasitas SDM melalui workshop dan kolaborasi dengan universitas dapat membantu aparatur menguasai analitik data. Ketiga, integrasi dengan sistem nasional seperti e-government dapat mempercepat transisi menuju pelaporan digital yang lebih akurat. Dengan langkah-langkah ini, Banten dapat mengejar ketertinggalan, sehingga monev anggaran menjadi lebih efektif dan berkontribusi pada tata kelola keuangan yang lebih baik secara keseluruhan. Pada akhirnya, adopsi visual analytics tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat

dalam pengawasan pembangunan daerah.

4. Kapasitas Fiskal, PAD, dan Pengaruhnya terhadap RKPD

Kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah faktor penting dalam menentukan seberapa transparan data keuangan pemerintah daerah, menurut penelitian Yuniar dan Firmansyah (2023). Daerah dengan PAD yang kuat cenderung memiliki keuntungan dalam beberapa hal penting, yang secara langsung mendukung transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola anggaran dengan lebih bebas, menginvestasikan dalam teknologi informasi yang canggih, dan membuat perencanaan pembangunan berdasarkan data yang akurat dan terukur. Oleh karena itu, PAD yang tinggi tidak hanya menjamin stabilitas fiskal tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk berkonsentrasi pada inovasi yang meningkatkan akuntabilitas masyarakat.

PAD yang dominan dari sumber pajak lokal di Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem perencanaan yang berorientasi data. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun infrastruktur digital yang mendukung keterbukaan informasi, seperti portal data terbuka dan dashboard interaktif, yang memungkinkan orang umum mengakses detail anggaran dan kinerja program. Metode ini membuat alokasi sumber daya lebih fleksibel, sehingga prioritas pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah tanpa terlalu bergantung pada arahan dari luar.

Sebaliknya, Provinsi Banten menghadapi keterbatasan yang berbeda. Ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat, seperti yang diakui dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten 2026, membuat prioritas pembangunan lebih sering diarahkan oleh kebijakan nasional daripada respons terhadap kondisi lokal. Ini mengurangi kemampuan daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengembangan sistem informasi yang mendukung transparansi. Akibatnya, proses perencanaan menjadi kurang adaptif, dan keterbukaan informasi keuangan belum mencapai tingkat yang optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, Banten dapat mengadopsi strategi jangka panjang seperti diversifikasi sumber PAD melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata atau industri kreatif. Selain itu, kolaborasi dengan DKI Jakarta melalui program pertukaran pengetahuan dapat membantu dalam membangun kapasitas sistem informasi. Investasi dalam pelatihan aparatur daerah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak juga penting. Dengan langkah-langkah ini, Banten dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, sehingga memperoleh fleksibilitas fiskal yang lebih besar dan mendorong keterbukaan informasi keuangan yang lebih baik. Pada akhirnya, peningkatan PAD tidak hanya memperbaiki transparansi, tetapi juga memperkuat otonomi daerah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan evaluasi terbaru dari Peraturan Gubernur 30/2025 untuk Banten dan Peraturan Gubernur 21/2025 untuk DKI Jakarta, berikut adalah pemeriksaan menyeluruh tentang elemen penting pemerintahan yang baik: transparansi, integrasi sistem, pemantauan dan evaluasi (monev), dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Analisis ini dibuat dengan menekankan kekuatan, area perbaikan, dan saran untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Metode ini mengacu pada penelitian terkait seperti Faedlulloh & Wiyani (2020) tentang transparansi digital, dan penelitian baru-baru ini tentang analitik visual dalam monev oleh Badewin dkk. (2025) dan Azarin & Supratiwi (2024).

Penguatan Pemerintahan yang Baik

Banten: Pelaksanaan pemerintahan yang baik di provinsi ini masih terbatas pada elemen normatif seperti aturan formal yang belum diterapkan secara efektif. Hal ini mengakibatkan kurangnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya publik, di mana pengambilan keputusan sering bergantung pada metode konvensional tanpa mekanisme

akuntabilitas digital yang memadai.

DKI Jakarta: Menurut Faedlulloh & Wiyani (2020), provinsi ini telah membuat kemajuan besar menuju standar transparansi digital. Dengan peningkatan PAD, sistem perencanaan dapat diintegrasikan dengan lebih baik. Ini berarti bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya normatif tetapi juga operasional, dengan fokus pada akuntabilitas real-time melalui platform digital.

Rekomendasi: Banten harus mengikuti model DKI Jakarta dengan memberikan anggaran untuk pengembangan sistem digital seperti portal terintegrasi untuk pelaporan keuangan dan partisipasi publik. Ini akan mengubah pendekatan normatif menjadi praktis.

Roadmap Data Terbuka

Provinsi Banten, Hingga saat ini, Banten belum memiliki roadmap data terbuka yang dirancang secara sistematis. Kondisi ini membuat penyediaan informasi publik berjalan tidak terstruktur, sehingga data yang tersedia sulit dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan inovasi kebijakan. Ketiadaan strategi jangka panjang dalam pengembangan data terbuka juga menghambat munculnya inisiatif berbasis analisis data, seperti pemodelan prediktif dan evaluasi kebijakan yang lebih akurat.

Provinsi DKI Jakarta, Berbanding terbalik dengan Banten, DKI Jakarta telah menyusun roadmap data terbuka yang komprehensif. Melalui integrasi data lintas sektor dan penguatan infrastruktur digital, provinsi ini mampu menyediakan informasi publik secara real-time untuk warga, akademisi, dan pelaku industri. Dukungan PAD yang besar menjadikan investasi pada sistem data sebagai prioritas, sehingga praktik transparansi dan akuntabilitas dapat dijalankan secara efektif.

Rekomendasi: Banten dapat memperbaiki tata kelola data publik dengan meniru pendekatan DKI Jakarta. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyusun roadmap pengembangan data terbuka secara bertahap dimulai dari pemetaan jenis data publik, pemilihan data yang dapat dibuka, hingga penyediaan API agar data dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pihak. Banten juga dapat menggandeng universitas atau lembaga riset untuk mempercepat proses standardisasi dan digitalisasi data.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan

Provinsi Banten, Sistem monitoring dan evaluasi di Banten masih mengandalkan laporan manual berupa narasi teks dan dokumen administratif. Pendekatan ini kurang mampu menangkap pola perubahan indikator pembangunan secara cepat. Rekomendasi dari Azarin & Supratiwi (2024) mengenai penggunaan analitik visual dalam monev juga belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang responsif dan tidak sepenuhnya berbasis data.

Provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta telah menerapkan sistem monev berbasis dashboard interaktif yang dilengkapi visualisasi data secara dinamis. Sistem ini selaras dengan rekomendasi Badewin dkk. (2025) dan Azarin & Supratiwi (2024), yang menekankan pentingnya dashboard untuk melihat tren dan anomali indikator pembangunan. Dukungan PAD memungkinkan pengembangan sistem ini, sehingga pemerintah dapat memantau capaian program secara real-time dan mengambil tindakan korektif dengan cepat.

Rekomendasi: Untuk meningkatkan efektivitas monev, Banten perlu mulai mengembangkan dashboard berbasis open-source yang menampilkan indikator pembangunan secara visual. Pemanfaatan teknologi seperti Python, Metabase, atau Tableau (versi publik) dapat menjadi solusi yang terjangkau. Selain itu, pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah penting untuk memastikan pemahaman dan adopsi yang optimal. Implementasi awal dapat ditargetkan dalam jangka 1–2 tahun.

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Provinsi Banten, Mekanisme Musrenbang masih dijalankan secara konvensional

melalui pertemuan tatap muka, sehingga partisipasi masyarakat bersifat formalitas dan terbatas pada warga yang dapat hadir secara fisik. Model ini menyulitkan kelompok rentan seperti perempuan pekerja, pemuda, atau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa untuk memberikan masukan secara efektif.

Provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta telah bertransformasi menuju Musrenbang berbasis digital, di mana masyarakat dapat mengirimkan usulan melalui platform daring yang terkoneksi dengan sistem perencanaan daerah. Aplikasi Musrenbang memungkinkan warga memberikan aspirasi kapan saja, memantau proses tindak lanjutnya, dan mendapatkan umpan balik secara cepat. Hal ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dan membuat proses perencanaan lebih inklusif serta berorientasi data.

Rekomendasi: Banten dapat memperkuat partisipasi publik dengan mengadopsi sistem Musrenbang digital seperti yang diterapkan di Jakarta. Pengembangan aplikasi berbasis mobile atau web untuk menampung aspirasi masyarakat perlu dibarengi sosialisasi intensif, terutama bagi kelompok yang kurang familiar dengan teknologi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan aksesibilitas, misalnya melalui bantuan Wi-Fi publik atau pemanfaatan fasilitas desa.

Di antara perbedaan ini, investasi dalam infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia sangat penting. Untuk kedua provinsi, kemajuan dapat dipercepat melalui kolaborasi lintas-daerah atau nasional, seperti berbagi praktik terbaik melalui forum seperti KemenPANRB. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah dan kematangan infrastruktur digital sangat memengaruhi transparansi dan efektivitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pergub RKPD 2026 menunjukkan perbedaan besar dalam tata kelola perencanaan di kedua provinsi: DKI Jakarta menggunakan pendekatan modern dan terbuka, sementara Banten masih menghadapi masalah struktural. Wawasan ini diperoleh dari referensi ke literatur empiris yang menekankan pentingnya penguatan sistem digital, keterbukaan data, dan penganggaran partisipatif sebagai pilar utama peningkatan perencanaan daerah. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor penentu dan strategi perbaikan.

Investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia dibatasi oleh kapasitas fiskal yang terbatas di Banten, sehingga RKPD sering kali dirancang melalui proses manual yang tidak transparan. Hal ini ditunjukkan oleh Pergub RKPD 2026, di mana proses perencanaan belum terintegrasi sepenuhnya dengan data real-time. Akibatnya, proyeksi anggaran dan prioritas pembangunan dapat menjadi tidak akurat. Sebaliknya, DKI Jakarta dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan platform digital karena PAD meningkat, yang memungkinkan RKPD yang lebih transparan melalui publikasi data terbuka. Dalam hal ini, Pergub RKPD 2026 menunjukkan integrasi yang lebih kuat, dengan mekanisme pelaporan yang memungkinkan pemantauan publik yang langsung. Untuk mengatasi masalah ini, Banten dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan berbagai sumber pendapatan, seperti pengembangan sektor pariwisata atau investasi hijau. Untuk mendukung modernisasi RKPD, mereka juga dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat atau donor internasional.

Secara keseluruhan, Pergub RKPD 2026 menunjukkan bahwa Banten dan DKI Jakarta tidak memiliki tingkat transparansi dan efektivitas RKPD yang sama. Kedua provinsi dapat meningkatkan tata kelola perencanaan dengan mengadopsi praktik berbasis literatur empiris seperti penguatan sistem digital, keterbukaan data, dan penganggaran partisipatif. Sementara DKI Jakarta dapat berbagi pengalaman untuk meningkatkan inovasi, Banten harus berkonsentrasi pada pembangunan fondasi digital. Mereka meningkatkan produktivitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Silakan beri tahu kami jika

Anda ingin analisis lebih khusus atau data tambahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan karakteristik kelembagaan, kapasitas fiskal, serta tingkat kematangan sistem tata kelola antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Status DKI Jakarta sebagai daerah khusus dengan kewenangan yang lebih terpusat mendorong lahirnya praktik birokrasi yang lebih modern, transparan, dan adaptif. Sementara itu, Banten sebagai provinsi otonom reguler masih menghadapi sejumlah keterbatasan mendasar yang memengaruhi kualitas perencanaan, terutama pada aspek integrasi data dan kemampuan fiskal.

Pertama, dalam hal penyusunan RKPD, DKI Jakarta telah mengembangkan sistem perencanaan berbasis data yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Dokumen RKPD disusun melalui pemanfaatan data real-time, dashboard kinerja, serta dukungan infrastruktur digital yang memungkinkan proses analisis menjadi lebih cepat dan akurat. Sebaliknya, Banten masih menjalankan proses perencanaan dengan pendekatan yang cenderung tradisional dan administrasi manual. Keterbatasan integrasi data dan kurangnya dukungan teknologi menyebabkan kualitas perencanaan belum mampu sepenuhnya mencerminkan kondisi pembangunan secara objektif.

Kedua, dari sisi APBD dan kapasitas fiskal, DKI Jakarta memiliki keunggulan yang sangat jelas. Struktur PAD yang kuat, didukung basis ekonomi perkotaan yang besar, memberikan ruang fleksibilitas fiskal untuk membiayai berbagai inovasi kebijakan. Hal ini memungkinkan Jakarta melakukan investasi signifikan pada pembangunan infrastruktur data, penguatan layanan publik, serta pembaruan sistem monitoring-evaluasi. Sebaliknya, Banten masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Ketergantungan tersebut membatasi kemampuan daerah dalam mengembangkan sistem anggaran yang modern dan menyulitkan penerapan kebijakan berbasis kebutuhan lokal.

Ketiga, terkait transparansi anggaran dan keterbukaan data, DKI Jakarta menunjukkan kemajuan yang sangat menonjol. Melalui platform Open Data Jakarta, masyarakat dapat mengakses informasi anggaran secara interaktif dan komprehensif. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Sementara itu, Banten belum memiliki peta jalan (roadmap) data terbuka yang jelas. Penyediaan data publik masih terfragmentasi dan belum memenuhi standar keterbukaan yang ideal, sehingga menghambat kemampuan masyarakat untuk mengawasi dan menilai kebijakan daerah secara objektif.

Keempat, dari aspek monitoring dan evaluasi (monev), DKI Jakarta telah mengadopsi monev digital berbasis visual analytics yang memungkinkan pemerintah mendeteksi masalah pembangunan secara cepat dan mengambil tindakan korektif secara tepat waktu. Sistem ini menghadirkan transparansi real-time bagi masyarakat. Di sisi lain, Banten masih mengandalkan laporan tekstual manual yang rawan keterlambatan, tidak terstandar, dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Keterbatasan SDM dan infrastruktur digital menjadi faktor yang sangat memengaruhi kualitas monev di Banten.

Kelima, dalam hal partisipasi masyarakat, DKI Jakarta memanfaatkan platform digital untuk Musrenbang, sehingga warga dapat memberikan aspirasi kapan saja dan melacak perkembangan usulannya. Pendekatan ini membuat proses perencanaan lebih inklusif dan demokratis. Sementara itu, Musrenbang di Banten masih cenderung bersifat tatap muka dan konvensional, menyebabkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata dan cenderung didominasi kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola

pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kekuatan fiskal, modernisasi teknologi, dan kapasitas birokrasi. DKI Jakarta menunjukkan bagaimana kombinasi ketiganya mampu menghasilkan sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan, inovatif, dan berorientasi hasil. Sebaliknya, Banten perlu memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan kualitas SDM birokrasi, serta mempercepat transformasi digital untuk menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa reformasi tata kelola, terutama melalui digitalisasi dan penguatan partisipasi Masyarakat, merupakan Masyara penting bagi daerah yang ingin meningkatkan kualitas pembangunan. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perbaikan, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada implementasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, K. et al. (2021). RKPD 2026 DKI JAKARTA. 32(3), 167–186.
- ALBERTINUS, R. (2018). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Electronic Government Pada Bidang Perencanaan. Repository.Ub.Ac.Id. <http://repository.ub.ac.id/165473/1/RobertoAlbertinus.pdf>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Detryesi, M. N., Rohima, M., Tabitha, N., & Avrilya, A. (2024). Kesenjangan Realisasi Anggaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Banten Periode 2023. Journal of International Multidisciplinary Research, 23. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Dian Fathirah, Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget Transparency and Accountability in Local Government. Asian Journal of Management Analytics, 3(4), 1171–1184. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>
- Faedlulloh, D., & Wiyani, F. (2019). Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Transparency Through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government. Jurnal Good Governance, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.41>
- Hadisutisna, S. (2025). MENAKAR AKUNTABILITAS FISKAL PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA: Analisis Dokumen Realisasi Anggaran Tahun 2021–2023. Jurnal Aspirasi, 15(2), 88–103. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v15i2.140>
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Syamsurizaldi, S. (2015). the Analysis of Planning and Budgeting Policy for Making More Significant Local Government Planning Policy in Indonesia. IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 1(2), 287. <https://doi.org/10.18769/ijasos.81928>
- Hasan, A. B. A., Setiani, B. A., Ridwan, G., Kaffah, E., & Hasan, M. (2020). Analisis Anggaran dan Potensi Program Keluarga Harapan Lokal di DKI Jakarta. Seknasfitra.Org. <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2021/12/56.-Analisis-Angagran-dan-Potensi-Program-Keluarga-Harapan-Lokal-di-DKI-Jakarta.pdf>
- Indonesia, U., Organisasi, K. E., & Islam, K. (2014). Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, hlm. 95-110 Vol 3 No 2. 3(2), 136–157.
- Islam, M. A. (2026). RKPD 2026 BANTEN. Nucl. Phys., 13(1), 104–116. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Kartika, I. G. A. Y., & Gorda, A. A. N. E. S. (2022). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 32(1), 3375. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p05>
- Pranesti, A. (2022). Kajian Sistem Penganggaran Partisipatif Pemerintah Daerah Melalui E-Government Sebagai Wujud Good Governance. Akuntansi 45, 3(1), 144–152.

<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i1.699>

- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2025). SMART GOVERNANCE: Transformasi Digital Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Sada Kurnia Pustaka.
- Setiawan, I. (2018). Handbook pemerintahan daerah. Wahana Resolusi..